

ABSTRAK

Kemajuan teknologi digital telah membawa dampak signifikan terhadap kehidupan masyarakat, terutama dalam penggunaan aplikasi komunikasi seperti WhatsApp. Namun, di balik kemudahan tersebut terdapat ancaman serius berupa kejahatan siber yang meretas akun dan menyalahgunakan data pribadi pengguna. Fenomena ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum atas data pribadi masih belum berjalan optimal di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab aparat penegak hukum dalam menangani kasus peretasan WhatsApp dan mengevaluasi implementasi perlindungan data pribadi berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan empiris, dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan korban peretasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara normatif perlindungan hukum telah tersedia, implementasinya di lapangan masih jauh dari ideal. Aparat penegak hukum belum menjalankan fungsinya secara maksimal, ditandai dengan lambannya respon, minimnya sarana pendukung, dan rendahnya pemahaman terhadap modus kejahatan digital. Keadaan ini menimbulkan kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dengan praktik di lapangan (*das sein*). Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam mengkritisi kesenjangan antara norma hukum dan praktik, memperkuat urgensi reformasi penegakan hukum digital, dan meningkatkan kesadaran masyarakat atas hak perlindungan data pribadi. Kesimpulan dan saran dari penelitian ini adalah diperlukan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum serta pemberdayaan masyarakat dalam melindungi data pribadinya.

Kata kunci: Peretasan WhatsApp, Data Pribadi, Penegakan Hukum, UU ITE, UU PDP

ABSTRACT

The advancement of digital technology has had a profound impact on society, particularly in the widespread adoption of communication applications like WhatsApp. However, behind this convenience lies a serious threat in the form of cybercrimes involving account hacking and the misuse of users' data. This phenomenon suggests that the legal protection of personal data in Indonesia has not yet been optimally implemented. This research aims to analyze the responsibilities of law enforcement authorities in handling WhatsApp hacking cases and to evaluate the implementation of personal data protection by the Law on Electronic Information and Transactions (ITE Law) and the Personal Data Protection Law (PDP Law). This study employs both normative and empirical juridical methods, using statutory and case study approaches. Data collection techniques include a literature review and interviews with victims of account hacking. The findings reveal that although normative legal protections exist, their implementation in practice remains far from ideal. Law enforcement agencies have not performed their functions effectively, as shown by slow responses, lack of adequate supporting tools, and limited understanding of digital crime patterns. This situation highlights a gap between legal norms (das sollen) and legal practice (das sein). This research provides a critical contribution by highlighting this normative-practical gap, reinforcing the urgency of reform in digital law enforcement, and raising public awareness regarding their rights to personal data protection. The conclusion and recommendation of this study emphasize the need to strengthen the capacity of law enforcement officers and empower the public to safeguard their data.

Keywords: *WhatsApp Hacking, Personal Data, Law Enforcement, ITE Law, PDP Law*